

NOTULA

Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022 terkait Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang dan Jasa

I. Pelaksanaan Kegiatan

Hari, Tanggal : Selasa, 13 Oktober 2020
Pukul : 09.00 – 11.10 WIB
Tempat : Zoom Meeting Room
Agenda : Pembahasan Matriks Target Capaian
Peserta : 1. Perwakilan LKPP
2. Perwakilan KIP
4. Perwakilan Dit. Polkom Bappenas
5. Tim Sekretariat Nasional OGI

II. Diskusi

1. Kepala Sekretariat Nasional Open Government Indonesia menyampaikan beberapa informasi terkait RAN 2020-2022, sebagai berikut:
 - a. Dalam system pelaporan monitoring dan evaluasi RAN OGI 2020-2022, K/L akan menyampaikan laporannya melalui sistem monev KSP. Sementara itu, CSO akan menyampaikan laporannya melalui sistem OGI yang saat ini sedang dikembangkan.
 - b. Adanya sistem pelaporan untuk K/L dan CSO diharapkan dapat menguatkan proses ko-kreasi di dalam RAN OGI.
2. Ibu Annie sebagai perwakilan dari Komisi Informasi Pusat menyatakan beberapa poin tentang keterbukaan informasi.
 - a. Kementerian Dalam Negeri sedang membuat peraturan standard pelayanan publik untuk pemerintah daerah.
 - b. Informasi darurat masih dalam kajian di internal KIP, tapi saat ini masih dikategorikan sebagai informasi serta merta.
 - c. Revisi PERKI SLIP sudah melalui hasil uji publik satu hingga enam. Masukan-masukan dari hasil uji publik akan coba diakomodasi di dalam revisi yang akan di bahas dalam pleno minggu depan.
 - d. Indeks Keterbukaan Informasi sedang disusun menggunakan data sekunder tahun 2020 dan data primer tahun 2021. Pengadaan

Barang dan Jasa akan coba dimasukkan dalam penyusunan indeks keterbukaan informasi ini.

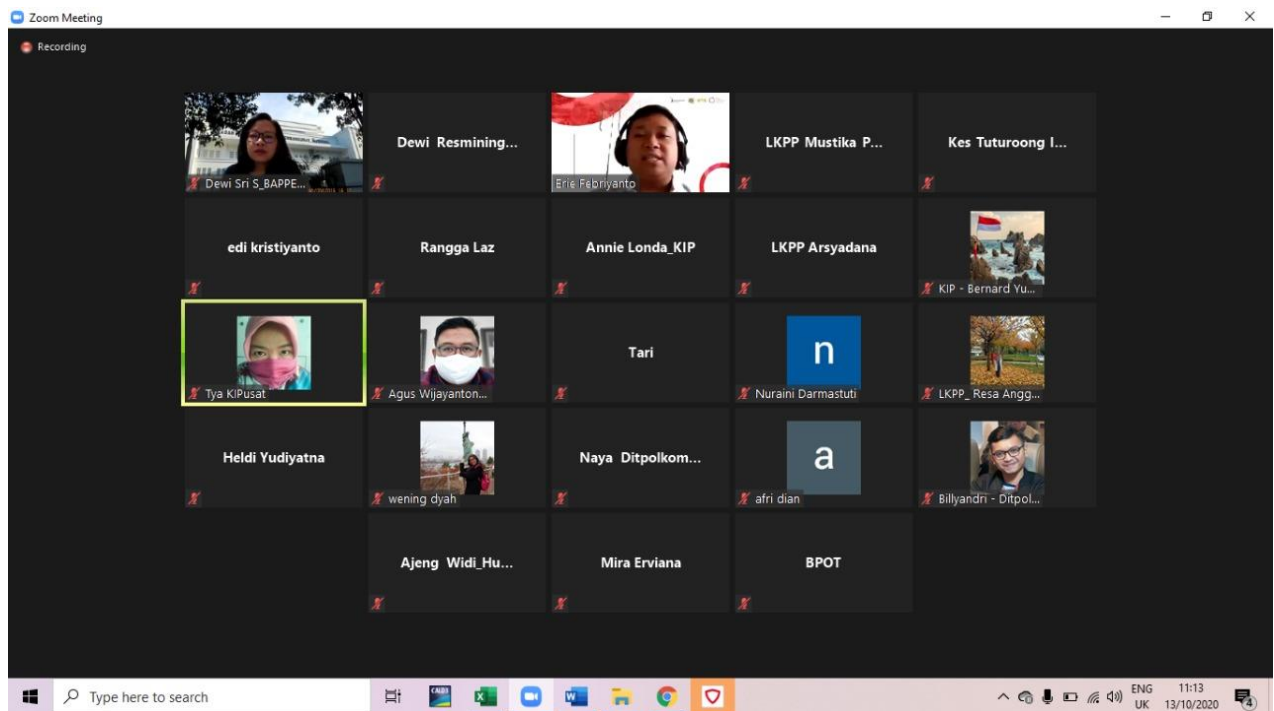
3. Ibu Tya sebagai perwakilan dari Komisi Informasi Pusat menyatakan beberapa poin tentang keterbukaan informasi.
 - a. Sosialisasi PERKI SLIP akan dilakukan ke K/L. Namun, di sistem Krisna, kegiatan ini masih implisit sehingga masuk di Pengarustamaan Keterbukaan Informasi di sektor Pengadaan Barang dan Jasa
 - b. Tidak ada turunan dokumen turunan PERKI SLIP.
 - c. Terkait pemerintah daerah, dapat ditambahkan indikator kedua di B12 tahun 2021 yakni 2. *Koordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri terkait keterbukaan informasi.*
 - d. Dalam instrument monev, K/L sudah patuh dalam menyampaikan SPK, tapi BUMN masih menyampaikan dokumen umum.
4. Ibu Dewi selaku Kasubit Komunikasi di Direktorat Politik dan Komunikasi Bappenas menyampaikan beberapa poin sebagai berikut.
 - a. KIP dapat mengirimkan surat kepada Kemendagri agar Kemendagri dapat membuat SE sehingga regulasi dapat sampai ke daerah.
 - b. SLIP KIP sudah sangat lengkap mengatur keterbukaan informasi hingga level desa.
 - c. Jika kegiatan dituliskan secara eksplisit di RKA dan krisna, maka pemantauan akan lebih mudah dilakukan. Misalnya, indikator menjadi bagian penilaian Badan Publik di instrumen monev terkait pengukuran informatif dan tidak informatif. Hal ini akan menunjukkan bahwa badan publik bisa informatif atau tidak. Oleh karena itu, monev dapat diperluas ke badan publik lainnya terutama BUMN.
 - d. Selain itu, jika indikator masuk ke dalam indeks keterbukaan informasi, maka Badan Publik yang sudah atau belum membuka informasi menjadi lebih terukur. Hasil dari monev dapat masuk menjadi data sekunder dalam instrumen keterbukaan informasi.
 - e. Badan publik tidak hanya pemerintah tapi Badan Publik lain yang menggunakan anggaran APBN seperti BUMN.

- f. OGI perlu mengirimkan matriks ini kepada direktorat Politik dan Komunikasi agar dapat menjadi bahan di tahun 2022, sehingga indikator ini dapat masuk dalam Prioritas Nasional 2022, khususnya terkait fungsi KIP dalam memastikan pelaksanaan UU dan menyelesaikan sengketa
5. Ibu Melinda selaku perwakilan dari LKPP menyampaikan beberapa poin sebagai berikut.
 - a. Peraturan akan ditindaklanjuti selama tidak bertentangan dengan Perpres.
 - b. Narasi ukuran keberhasilan diubah menjadi *Terbukanya informasi pengadaan barang dan jasa pemerintah, termasuk pengadaan dalam kondisi darurat dengan mengoptimalkan portal pengadaan nasional atau sistem informasi yang dikembangkan oleh LKPP*.
 - c. Dokumen kontrak selama masih dalam tahap kontrak akan menjadi rahasia. Tapi, jika sudah masuk progres, maka dokumen bisa terbuka.
6. Ibu Mustika selaku perwakilan LKPP menjelaskan beberapa hal sebagai berikut.
 - a. Perpres 16 sudah mengatur terkait portal pengadaan nasional sehingga tidak perlu membuat kanal baru. Oleh karena itu, target diubah menjadi: *Persiapan pengembangan portal pengadaan nasional atau sistem informasi terkait pengadaan barang dan jasa dalam kondisi darurat*.
 - b. Hal yang menjadi pertimbangan adalah kepatuhan pemerintah daerah dalam menyampaikan karena sampai saat ini masih 20%. Oleh karena itu perlu adanya koordinasi utk menggerakkan dan mendorong kepatuhan pemda.
 - c. Usulan Ukuran Keberhasilan *Mendorong pemanfaatan SPSE di tingkat pemerintah daerah dan K/L secara penuh* akan didiskusikan di internal LKPP terlebih dahulu.

III. Tindak Lanjut

1. Sekretariat Open Government Indonesia akan mengirimkan target capaian yang sudah dirapikan untuk dikoordinasikan kembali secara internal di Kementerian/Lembaga dan CSO.

IV. Dokumentasi



Diskusi Pembahasan Usulan RAN OGI 2020-2022